

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Arti pemberdayaan menurut *kkbi.go.id* merupakan cara, proses, dan perbuatan memberdayakan. Masyarakat berarti sejumlah orang dalam cakupan seluas-luasnya yang terikat oleh kebudayaan yang mereka anggap sama. Pemberdayaan masyarakat menurut Sipahelut merupakan suatu proses pemindahan kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok masyarakat agar menjadikan suatu kelompok masyarakat tersebut menjadi lebih produktif untuk mencapai kesejahteraan hidup.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas pemberdayaan masyarakat pada dasarnya upaya kegiatan memberdayakan, dan hal tersebut ada pada masing-masing individu dalam masyarakat agar memotivasi, mendorong, dan mampu membangkitkan kemandirian dan kemampuan sehingga tumbuh rasa percaya diri.

Istilah pemberdayaan masyarakat di Indonesia cukup dikenal dengan istilah pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia

¹¹ Eko Sudarmanto, Erika Revida, Dkk, *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 124

membuat berbagai kebijakan dan program sebagai upaya pengentasan kemiskinan.¹²

2. Kemiskinan

a. Penjelasan Kemiskinan

Kemiskinan yaitu suatu keadaan secara ekonomi tidak mampu dalam pemenuhan standar rata-rata kebutuhan mendasar pada sebuah daerah. Hal ini ditandai oleh minimnya tingkat pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Disisi lain rendahnya tingkat pendapatan akan berpengaruh terhadap tidak mampunya dalam pemenuhan standar pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Adapun menurut pendapat Pramanik dan Shirazi, seperti halnya yang telah dikutip oleh Irfan Syauqi Beik yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan sebuah keadaan kelompok maupun individu yang mana ia tidak mempunyai sumber daya yang memadai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dari segi sosial, ekonomi, spiritual, dan psikologisnya.

Penjelasan lain terkait kemiskinan yaitu, sebuah kondisi yang mana anggota dari masyarakat ataupun seorang keluarga tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidup pokoknya dengan layak, seperti halnya pada rata-rata masyarakat yang lain.

¹² Muhammad Muqouwis, *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Konsep Dan Aplikasi Dari PKMD Hingga Desa Siaga*, (Bandar Lampung : Yayasan Bina Masyarakat Mandiri, 2017), hal. 1-2

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan tidak mempunya sekelompok masyarakat atau individu dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka.¹³

b. Indikator Kemiskinan

Konsep yang digunakan oleh BPS untuk mengukur kemiskinan yaitu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). *Handbook on Poverty and Inequality* yang telah diterbitkan oleh World bank dijadikan sebagai acuan dalam konsep ini. melalui pendekatan ini, kemiskinan dilihat sebagai tidak mempunya seseorang dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari segi pengeluarannya. Enam indikator juga digunakan untuk mengukur kemiskinan yaitu kesehatan, pekerjaan, pendidikan, pangan, perumahan, dan air minum. Penduduk masuk dalam kategori miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.¹⁴

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kartiawati yang berjudul Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Islam, yang menyatakan bahwa yang disebut keluarga miskin menurut BPS yaitu:

¹³ Desi Pratiwi, *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, (Lampung : IAIN Metro, 2020), hal. 28-30

¹⁴ BPS, "Kemiskinan dan Ketimpangan" dalam <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, diakses 16 Januari 2022 pukul 20.00

- a) Per anggota keluarga/rumah tangga memiliki luas bangunan kurang dari 8 M²
- b) Memiliki lantai rumah berupa papan/tanah yang berkualitas rendah
- c) Tidak tersedianya fasilitas MCK
- d) Rumah dengan dinding dari papan/bambu yang kualitasnya rendah
- e) Tidak memiliki sumber air minum yang bersih
- f) Tidak menggunakan sumber penerangan dari listrik
- g) Bahan bakar yang digunakan untuk memasak yaitu kayu
- h) Rata-rata dalam satu hari makan sebanyak kurang dari dua kali
- i) Tidak mempunya dalam membeli susu/daging/ayam dalam satu minggu
- j) Tidak mempunya membeli baju baru untuk setiap anggota dalam rumah tangga
- k) lapangan pekerjaannya yaitu nelayan, pekebun, atau petani
- l) ketidakmampuan untuk berobat ke klinik atau puskesmas
- m) kepala rumah tangga memiliki pendidikan tidak tamat SD atau tidak sekolah
- n) tidak mempunyai barang/aset berharga dengan nominal minimal Rp. 500.000

apabila suatu masyarakat memiliki 9 poin di atas, maka masuk dalam kategori rumah tangga miskin, dalam artian belum sejahtera.¹⁵

c. Program Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Seperti halnya Perpres No. 15 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh pemerintah, terkait penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan utama untuk percepatan pengurangan angka masyarakat miskin, melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau biasa disebut TNP2K, yang secara langsung dikoordinasi oleh Wakil Presiden RI, yang mana terdapat tiga kelompok kebijakan yang sudah diklasifikasi, diantaranya:

a) Klaster I

Pada klaster ini merupakan kelompok dari kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berupa bantuan juga perlindungan sosial. Dalam hal ini fokus utamanya yaitu untuk memenuhi hak mendasar dalam rangka perbaikan kualitas hidup bagi masyarakat miskin agar mencapai kehidupan yang lebih baik. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung, dan diklasifikasikan berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat atau JAMKESMAS, kemudian pada tahun 2014

¹⁵ Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2017), Hal. 92

berubah menjadi BPJS, kemudian RASKIN atau Beras untuk keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

b) Klaster II

Pada klaster ini merupakan pengelompokan dari kebijakan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Dengan fokus utamanya yaitu perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin menggunakan pendekatan berupa pemberdayaan dengan tujuan agar masyarakat yang dimaksud bisa memperbaiki kualitas hidupnya dan terlepas dari kemiskinan, yang memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang mereka miliki. Dalam hal ini yaitu berupa program PNPM Mandiri.

c) Klaster III

Pada klaster ini berupa kebijakan dengan basis utamanya berupa pemberdayaan usaha mikro, dimana masyarakat miskin diberikan akses yang luas agar bisa berupaya dan mampu memperbaiki kualitas hidup mereka, melalui pemberian modal ataupun pembiayaan berskala mikro. Dalam hal ini berupa program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sehingga dari pemaparan di atas bisa dilihat bahwasannya pemerintah terus berupaya untuk bisa mengatasi permasalahan kemiskinan melalui berbagai program dan strategi penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan. Dan salah satunya

yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan bantuan secara tunai bersyarat untuk Rumah Tangga Miskin.¹⁶

3. Ekonomi Pembangunan

Pembangunan ekonomi menurut Nugroho merupakan proses yang menjadikan pendapatan perkapita penduduk dalam suatu masyarakat meningkat selama jangka panjang bersama dengan adanya perubahan ciri-ciri penting pada masyarakat, baik perubahan dalam hal pola berpikir masyarakat, teknologi, ataupun kelembagaan. Wikipedia menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses dari kenaikan pendapatan perkapita dan pendapatan total dengan memperhitungkan penambahan penduduk yang diikuti pemerataan pendapatan pada penduduk dalam suatu negara dan perubahan fundamental pada struktur ekonomi suatu negara.¹⁷

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi secara ringkas dapat diartikan sebagai suatu proses yang menjadikan pendapatan perkapita penduduk pada suatu negara mengalami peningkatan dan dalam jangka panjang. Pembangunan adalah suatu tindakan positif berupa upaya yang harus direalisasikan setiap negara agar bisa meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Sehingga sangat dibutuhkan peran dari

¹⁶ Desi Pratiwi, *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)...*, hal. 30-32

¹⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi, diakses tanggal 20 Januari 2022 pukul 15.00 WIB

pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait dalam suatu negara untuk ikut serta secara aktif dan berperan dalam pembangunan. Disisi lain Masyarakat dalam suatu negara harus melakukan proses perkembangan agar bisa mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan ketentraman.¹⁸

Dibalik berjalannya suatu rencana tentu tidak akan lepas dari yang namanya hambatan, begitu juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia, hambatan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia maupun di negara sedang berkembang lainnya yaitu :

a. Pendidikan rendah dan perkembangan jumlah penduduk

Perkembangan jumlah penduduk dapat menjadi penghambat atau pendorong pembangunan. Perkembangan jumlah penduduk yang cepat dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi jika penduduknya memiliki kapasitas untuk menghasilkan dan menyerap produksi yang dihasilkan. Akan tetapi perkembangan penduduk yang pesat pada negara yang sedang berkembang akan menjadikan penghambat proses pembangunan ekonomi.

b. Perekonomian yang sifatnya dualistik

Perekonomian dengan sifat dualistik disini merupakan penghambat dalam pembangunan ekonomi, karena menjadikan tingkat produktivitas berbagai macam kegiatan yang produktif

¹⁸ Patta Rapanna dan Zulkifikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar : CV Sah Media, 2017), hal. 1-2

menjadi rendah, disisi lain upaya untuk melakukan perubahan menjadi sangat terbatas.

c. Tingkat Permodalan yang rendah

Hambatan utama dalam pembangunan ekonomi yaitu tingkat pembentukan modal yang rendah, pembentukan modal pada negara yang sedang berkembang sering dikenal dengan istilah lingkaran yang berujung pangkal, dimana produktivitas yang cukup rendah menjadikan rendahnya dalam pembentukan modal.¹⁹

4. Implementasi Kebijakan

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier yang dikutip oleh Nurdiana menyatakan bahwa implementasi yaitu pemahaman terkait apa yang terjadi secara nyata setelah suatu program direalisasikan, fokus perhatian dalam implementasi kebijaksanaan yaitu pada kejadian maupun kegiatan yang terjadi setelah ditetapkannya pedoman kebijaksanaan negara, baik mencakup usaha untuk mengadministrasikannya ataupun menjadikan munculnya akibat ataupun dampak nyata pada kejadian dan masyarakat.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 20

Berdasarkan pemaparan di atas, secara ringkas pengertian dari implementasi kebijakan tidak bisa dijalankan sebelum ditetapkan tujuan dan sasaran.²⁰

5. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Pengertian dari efektivitas yaitu, suatu keterkaitan antara *output* dan *outcome*, yang mana *outcome* sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu perubahan perilaku dan perubahan kondisi. Pengertian lain dari efektivitas yaitu, dengan berdasar pada hubungan antara output dengan tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Suatu program, kegiatan, atau organisasi bisa dikatakan efektif jika output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.²¹

Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengerjakan sesuatu sebaik mungkin dan benar, dimana erat sekali hubungan antara efektivitas dan tujuan. Hal ini dikarenakan jika jarak organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka bisa menjadikan organisasi tersebut semakin efektif. Efektivitas adalah salah satu keadaan yang terjadi jika diharapkan. Jika seseorang menginginkan untuk melakukan sebuah pekerjaan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka

²⁰ Nurdiana, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Nambi Kabupaten Mamasa*, (Makassar : Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017), hal. 19

²¹ I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja pada Sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hal. 24

apa yang dikerjakan seseorang tersebut dapat dikatakan efektif jika timbul sebuah dampak atau tujuan yang ditetapkan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.²² Menurut Stoner dalam penelitian Mas Denni Hasibuan, menekankan bahwa efektivitas merupakan kunci dari kesuksesan suatu program dan efektivitas sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi.²³

Adapun penilaian efektivitasnya suatu program sangat perlu untuk dilakukan agar bisa diketahui sudah sejauh mana manfaat dan dampak dari berjalannya suatu program tersebut. Hal ini dikarenakan efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang sebelumnya telah ditentukan. Kemudian dari penilaian tersebut bisa dijadikan pertimbangan bagaimana program tersebut untuk kedepannya.²⁴

b. Pengukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Ukuran dari efektivitas menggambarkan standard dapat terpenuhi atau tidaknya tujuan dan sasaran yang diharapkan, bisa diketahui sudah sejauh mana program, organisasi ataupun kegiatan dalam menjalankan fungsinya dengan optimal. Adapun

²² Rahmah Muin Dan Rosdiana, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar” *L-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial*, Vol. 5, No. 2, Polewali Mandar 2020. Hlm. 15-16

²³ Mas Denni Hasibuan, *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Sibuhuan Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas*, (Medan : Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), hal. 20

²⁴ Ahmad Yasir, dkk, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sumber Harapan Dusun Solor Medan”, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam*, vol. 7 No. 2, Medan, Tahun 2021, hal. 61-62

kriteria pengukuran efektivitas dalam organisasi menurut Steers, yaitu:

- a) kemampuan dalam beradaptasi atau penyesuaian
- b) Tingkat produktivitas
- c) Kemampuan meningkatkan keuntungan
- d) Kepuasan kerja, dan
- e) Pencarian sumber daya yang diperlukan

Kemudian pengukuran efektivitas organisasi menurut Gibson, yaitu :

- a) Jelasnya tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi
- b) Kejelasan terkait strategi untuk mencapai tujuan
- c) Perumusan kebijaksanaan dan proses dalam analisis yang baik dan tepat
- d) Perencanaan sudah matang
- e) Ketepatan penyusunan program
- f) Sarana dan prasarana yang memadai
- g) Tersedianya sistem pengendalian dan pengawasan yang sifatnya mendidik.²⁵

Tingkat efektivitas yang ingin diraih dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mampu digunakan dalam penentuan apakah program yang sudah berjalan bisa dikatakan

²⁵ Milawati Selvia Anggraeni, *Efektivitas Serta Dampak Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung*, (Tulungagung : Skripsi IAIN Tulungagung, 2020), hal. 14-15

efektif atau tidak. Efektivitas merupakan suatu pencapaian dari tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki secara seefisien mungkin, hal ini dapat ditinjau dari segi input, output dan proses. Oleh karena itu, efektivitas suatu program bisa dirumuskan seperti penerapan sasaran yang menunjukkan sudah sejauh mana capaian sasaran suatu program yang telah ditentukan, memberikan dampak atau pengaruh sesuai dengan tujuan dari program yang telah ditetapkan, atautkah tidak berpengaruh.

c. Indikator Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Indikator adalah suatu hal yang mampu dijadikan sebuah acuan dalam penentuan pelaksanaan sebuah program yang dijalankan, seperti halnya indikator efektivitas dalam pelaksanaan program keluarga harapan, yang mana mampu memonitoring dan merupakan bagian dari penilaian efektivitas pelaksanaan program tersebut. Karena akan selalu ada evaluasi setelah dijalankannya suatu program.²⁶

Adapun kriteria dari indikator efektivitas seperti yang dijelaskan oleh Makmur dalam Amrizal yaitu,

a) Ketepatan waktu

Jika penggunaan waktu sesuai dan tepat maka akan tercipta efektivitas dari pencapaian sebuah tujuan yang sebelumnya

²⁶Ahmad Yasir, dkk, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan...", hal. 62

telah ditetapkan, hal ini karena waktu adalah penentu tingkat keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi

b) Ketepatan dalam memperhitungkan biaya

Maksud dari efektivitas disini yaitu, tepatnya dalam penetapan satuan biaya, atau dalam penjelasan lain tidak lebih dan tidak kurang dalam pembiayaan hingga kegiatan atau program bisa berjalan dan selesai dengan sebaik mungkin

c) Ketepatan pengukuran

Dalam hal ini efektivitas seperti tepatnya ukuran, sebagaimana yang sudah dibuat di awal yang dijadikan tanggung jawab dalam berjalannya sebuah organisasi

d) Ketepatan dalam berpikir

Tepat atau tidak dalam berpikir sangat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas suatu program, ketepatan dalam berpikir akan menjadikan efektivitasnya kegiatan atau program sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan dan mampu memberikan hasil yang optimal.

e) Ketepatan dalam menjalankan perintah

Faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan sebuah organisasi yaitu tepat tidaknya pemimpinnya dalam memberikan instruksi atau perintah.

Perintah yang diberikan seharusnya mudah untuk dimengerti dan jelas.

f) Ketepatan dalam penentuan tujuan

Tepat tidaknya dalam menentukan tujuan adalah kegiatan suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diharapkan dan telah ditentukan di awal. Jika tujuan dibuat secara tepat, maka akan sangat mampu meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan program yang berkelanjutan.

g) Ketepatan sasaran

Jika sasaran ditentukan dengan tepat, baik yang bersifat individu ataupun organisasi akan sangat menentukan tingkat keberhasilan aktivitas suatu organisasi tersebut.²⁷

Menurut Budiman, dalam penelitian yang dilakukan oleh Milawati Selvia Anggraeni yang berjudul “Efektivitas serta Dampak Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung” yang menyatakan bahwa variabel yang digunakan dalam mengukur tingkat efektivitas program yaitu:

a) Tepatnya sasaran suatu program, hal ini merupakan sudah sejauh apa ketepatan peserta suatu program dengan sasaran yang telah ditentukan.

²⁷ Milawati Selvia Anggraeni, *Efektivitas Serta Dampak...*, hal. 16-17

- b) Adanya sosialisasi suatu program, terdapatnya kegiatan sosialisasi program untuk menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman terkait program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat secara umum dan khususnya pada peserta program tersebut.
- c) Tujuan dari program, merupakan sudah seberapa jauh kecocokan antara hasil setelah program terlaksana dengan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan di awal.
- d) Pemantauan pelaksanaan program, merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan program sebagai wujud kepedulian terhadap para peserta program.²⁸

6. Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan atau biasa dikenal dengan istilah PKH merupakan salah satu program pemerintah dalam hal perlindungan sosial berupa pemberian bantuan uang tunai terhadap keluarga yang tergolong sangat miskin yang melaksanakan dan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan maksud untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hal. 15

²⁹ Aditio Gustomi, *Praktek Andragogy Di Masyarakat*, (Madiun : CV Bayfa Cendekia Indonesia, 2021), hal. 9.

PKH merupakan program yang dibuat pemerintah sejak tahun 2017, atau bisa disebut juga dengan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB), PKH tergolong sebagai klaster I strategi mengatasi kemiskinan masyarakat Indonesia yang erat kaitannya dengan kesehatan, pendidikan, penyandang disabilitas yang tergolong berat dan pemenuhan mendasar bagi para lansia.³⁰

b. Tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Secara umum tujuan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu dengan maksud untuk mengentas kemiskinan, peningkatan kualitas dari SBM (Sumber Daya Manusia), dan perbaikan pola perilaku Rumah Tangga Miskin (RTM) yang sebagian besar masih belum cukup mendukung meningkatkan kesejahteraan. Secara khusus tujuan PKH yaitu,

- a) Dapat meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat PKH, melalui adanya layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- b) Meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan.
- c) Menciptakan kemandirian penerima manfaat PKH dan perubahan pada perilaku dalam mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

³⁰ Sofyan Eka Sandi, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung : Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal. 18

- d) Mengurangi kesenjangan dan kemiskinan
 - e) Mengenalkan manfaat produk maupun jasa keuangan formal kepada penerima manfaat PKH.³¹
- c. Hak dan kewajiban yang Harus Dipenuhi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Ada beberapa persyaratan yang wajib untuk dipenuhi peserta PKH. Untuk anak dari peserta PKH terdaftar ataupun didaftarkan pada satuan pendidikan tingkat (MI/SD/Paket A/Salafiyah Ula/SDLB atau MTS/SMP Salafiyah Wustha/Paket B/SMLB juga termasuk MTS/SMP terbuka) disisi lain juga harus memenuhi kehadiran dalam kelas dengan ketentuan minimal 85% dari hari masuk sekolah dalam satu bulan selama berlangsungnya tahun ajaran. Jika terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah memasuki tingkat SD ataupun sejenisnya, maka anak yang bersangkutan akan dikenakan persyaratan pendidikan seperti halnya yang diberlakukan terhadap anak peserta PKH yang lain.

Apabila dari peserta PKH memiliki anak dengan usia 7-18 tahun dimana ia belum menyelesaikan sekolah dasar, maka dari pihak peserta diharuskan untuk mendaftarkan anaknya tersebut pada satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar 9 tahun. Jika anak yang bersangkutan sedang bekerja atau berstatus sebagai pekerja anak atau dengan kata lain telah meninggalkan

³¹ Kementrian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan...*, hal. 22

sekolah dalam rentan waktu yang lama, maka anak yang bersangkutan wajib ikut serta dalam program remedial untuk mempersiapkan lagi kesatuan dalam pendidikan. Dalam hal tersebut satuan pendidik juga harus menyiapkan program remedial. Jika anak yang bersangkutan pada usianya yaitu 7-18 tahun masih mengalami buta aksara, sehingga diharuskan untuk mengikuti program pendidikan keaksaraan fungsional pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

a) Hak peserta PKH dalam bidang pendidikan

Para peserta PKH berhak untuk mendapatkan bantuan berupa uang tunai jika sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

b) Kewajiban Peserta PKH

Agar bisa mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan bantuan tunai PKH. Maka peserta PKH wajib untuk memenuhi persyaratan ataupun komitmen yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Harus ikut hadir dalam pertemuan awal
2. Harus mendaftarkan anak dalam kesatuan pendidikan
3. Harus selalu mentaati komitmen.³²

³² Winda Quratu Aini, *Manajemen Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Nagari Sungayang*, (Batusangkar : Skripsi IAIN Batusangkar, 2020), hal. 24-25

d. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Kriteria

Adapun besaran dari bantuan tunai untuk para peserta PKH sangat bergantung pada jumlah anggota keluarga yang telah diperhitungkan pada penerimaan bantuan. Meliputi komponen pendidikan maupun kesehatan. Besaran dari bantuan bersifat fleksibel, yang mana sewaktu-waktu bisa berubah menyesuaikan dengan keadaan keluarga pada saat itu ataupun jika peserta PKH sudah tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan peraturan menteri sosial RI, yang menyatakan terkait indeks bantuan setiap tahunnya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indeks bantuan KPM PKH Per Tahun

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (RP/Tahun/keluarga)
1.	Bantuan tetap KPM regular	550.000
2.	Anak usia dini	3.000.000
3.	Ibu hamil	3.000.000
4.	Sd/ sederajat	900.000
5.	Smp/ sederajat	1.500.000
6.	Sma/ sederajat	2.000.000
7.	Penyandang disabilitas	2.400.000
8.	lansia berusia 60 tahun ke atas	2.400.000

(sumber : Pemerintah Sosial RI, 2018)

Berdasarkan tabel 2.1 terkait indeks bantuan KPM PKH RI di atas menyatakan bahwa terkait bantuan PKH untuk kesehatan berlaku bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) kemudian anak yang berusia di bawah 6 tahun ataupun ibu hamil dan ibu

nifas. Besarnya bantuan tidak dihitung dengan berdasar pada jumlah anak, melainkan 16% rata-rata dari pendapatan RTSM per tahunnya, adapun batas minimum dan maksimumnya yaitu antara 15% - 25% dari pendapatan.³³

e. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

Dengan berdasar pada pedoman umum Program Keluarga Harapan, pelaksanaan kegiatan PKH secara teknis harus berjalan atas dasar peraturan atau perundang-undangan berikut :

- a) Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 mengenai pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan (PKH)
- b) Undang-undang No. 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional
- c) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas
- d) Undang-undang No. 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan sosial
- e) Undang-undang No. 13 Tahun 2011 mengenai upaya penanganan terhadap masyarakat miskin
- f) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 mengenai percepatan dalam menangani kemiskinan.³⁴

³³ *Ibid.*, hal. 23

³⁴ Milawati Selvia Anggraeni, *Efektivitas Serta Dampak...*, hal. 20

B. Penelitian Terdahulu

1. Felinda Wulandari, Dkk (2020) pada penelitiannya dalam jurnal Caraka Prabu, yang berjudul Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pelaksanaan PKH dinilai belum cukup efektif dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di kecamatan padalarang kabupaten bandung Barat, hal ini dikarenakan waktu dalam penyaluran dana PKH ternyata bersifat kondisional dan belum konsisten, dana yang diterima oleh peserta PKH ternyata tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah, dana akomodasi untuk pendamping PKH juga belum sesuai, kurang tegasnya sanksi untuk peserta PKH yang tidak melakukan kewajiban mereka, dan adanya kecemburuan sosial antara RTSM yang tidak terpilih sebagai penerima manfaat PKH dengan RTSM yang terpilih mendapatkan manfaat dari program PKH. Dari segi metode penelitian yang digunakan antara penelitian Felinda Wulandari dengan penelitian ini kurang lebih sama, adapun perbedaan yang mendasar antara keduanya salah satunya dalam penelitian Felinda Wulandari hanya meneliti tentang tingkat efektivitas PKH sedangkan dalam penelitian ini akan melakukan tinjauan lebih lanjut terkait implementasi dan efektivitas PKH, disisi lain lokasi penelitian juga berbeda, dalam penelitian Felinda wulandari dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat,

sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Munungrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Dari segi informan antara penelitian ini juga berbeda, dalam penelitian Felinda Wulandari informannya yaitu Kepala Unit Pelaksana PKH di Kabupaten Bandung Barat, koordinator pendamping PKH Kecamatan Padalarang dan Peserta PKH. sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu, Koordinator Pendamping PKH Desa Munungrejo, Koordinator penanggung jawab masing-masing dusun di desa Munungrejo, dan peserta PKH di Desa Munungrejo.³⁵

2. Apando Ekardo, Dkk. (2014) Dalam karya ilmiahnya yang berjudul Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa Apando Ekardo (2014), dalam penelitiannya pada Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Yang Berjudul Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir Kab. Pesisir Selatan. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa program program PKH di Nagari Lagan Hilir Punggasan bisa dikatakan efektif, hal ini dilihat dari tujuan program. Akan tetapi pada sisi penetapan sasaran belum bisa dikatakan efektif, hal ini dikarenakan belum tepatnya dalam penentuan sasaran, hal ini terlihat dari masyarakat yang tergolong ekonominya menengah ke atas ternyata masih terdaftar

³⁵ Felinda Wulandari, Dkk, "Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal Prabhu Caraka*. Vol. 4 No. 1. Bandung, 2020, hal. 36

sebagai peserta penerima manfaat PKH, sedangkan masih ada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang tidak terdaftar sebagai peserta. Dari segi metode penelitian Antara penelitian Apando Ekardo dengan penelitian penelitian yang akan dilakukan peneliti sebenarnya tidak ada perbedaan karena memang metode penelitian kualitatif pada umumnya sama yaitu menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, akan tetapi tentu ada perbedaan antara keduanya seperti data dan sumber data antara keduanya, salah satunya sumber data sekunder yang digunakan sangat besar kemungkinan berbeda, dari segi informan juga tentu berbeda, disisi lain dari segi lokasi penelitian juga berbeda, penelitian Apando Ekardo dilaksanakan di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Munungrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian Apando tinjauan yang diteliti hanya tingkat efektivitas PKH dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam penelitian ini melakukan tinjauan lebih lanjut terkait implementasi dan tingkat efektivitas PKH dalam merealisasikan tujuan.³⁶

³⁶ Apando, Dkk, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir Kab. Pesisir Selatan", *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol III Nomor 1 Tahun 2014, hal. .3-8

3. Dyah Ayu Virgoreta, Dkk. Dalam penelitiannya pada jurnal *Administrasi Publik*, dengan judul implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, studi pada desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Dengan hasil penelitian yang menyatakan implementasi dari PKH disana sudah bisa dikatakan baik, hal ini terlihat dari komitmen dari peserta PKH yang terus dijaga. Dan adanya sanksi bagi peserta yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga membuat peserta PKH menjadi disiplin. Disisi lain pendamping PKH yang tidak henti dalam mengingatkan peserta PKH untuk selalu memenuhi komitmen mereka. Dalam penelitian tersebut juga menyatakan bahwa besaran bantuan sudah cukup bisa membantu masyarakat penerima manfaat PKH dalam memenuhi kebutuhan mereka. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, jika dibandingkan antara penelitian Dyah Ayu, Dkk dengan penelitian ini, perbedaanya terletak pada teori yang digunakan antara keduanya, lokasi penelitian juga berbeda, dalam penelitian tersebut melakukan tinjauan terhadap implementasi PKH sedangkan dalam penelitian ini nantinya melakukan tinjauan pada implementasi PKH dan tingkat efektivitas pada realisasi PKH dalam melaksanakan tujuan.³⁷
4. Adinda Chivita, Dkk. (2020) dalam penelitiannya pada *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, dengan judul *Pengaruh Implementasi*

³⁷ Dyah Ayu Virgoreta, Dkk, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)", *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2, No 12. Tuban, 2015, hal. 3-4

Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, yang menyatakan dalam implementasi kebijakan yang sudah berjalan dinilai berpengaruh dalam efektivitas pengentasan kemiskinan. Dalam artian jika semakin baik pelaksanaan dari program diimplementasikan maka tingkat efektivitas program juga akan semakin baik. Perbedaan mendasar antara penelitian Adinda Chivita, Dkk dengan penelitian ini yaitu terletak pada metode yang digunakan. Penelitian Adinda menggunakan pendekatan Kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dari segi metode pengumpulan data dan metode analisis data juga terdapat perbedaan. Penelitian Adinda menggunakan metode analisis berupa uji koefisien korelasi, koefisien determinasi, analisis regresi linier, dan uji t-parsial, sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dari sisi teori yang digunakan juga terdapat perbedaan, dan lokasi untuk penelitian juga tentu berbeda antara keduanya. Yaitu antara Kota Sukabumi dan Kabupaten Lamongan.³⁸

5. Kartiawati (2017), dalam skripsinya yang berjudul Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Peserta PKH

³⁸ Adinda Chivita Fauziah, Dkk , “Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 7 Nomor 2, Sukabumi Tahun 2020, hal. 227 -234

Kampung Bonglai Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pelaksanaan PKH di Kampung Bonglai dinilai belum cukup efektif, hal ini terlihat dari kurang penyalahgunaan dana PKH oleh peserta PKH dan belum tepat sasaran. Sehingga pelaksanaan PKH belum sepenuhnya bisa menanggulangi angka kemiskinan di Kampung Bonglai. Metode penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh Kartiawati dan penelitian ini pada dasarnya sama karena menggunakan pendekatan penelitian kualitatif akan tetapi ada perbedaan dalam teknik pengolahan data, dalam penelitian Kartiawati menggunakan teknik pemeriksaan data, penandaan data, rekomendasi data, dan sistematisasi data. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari segi lokasi juga tentu berbeda, hal ini menjadikan informan yang digunakan juga berbeda. Disisi lain teori yang digunakan antara keduanya juga terdapat perbedaan, yang menjadi perbedaan mendasar selanjutnya yaitu dalam penelitian Kartiawati melakukan tinjauan pada perspektif ekonomi islam sedangkan dalam penelitian ini melakukan tinjauan ekonomi secara umum.³⁹

6. Fitria Handayani (2020) dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam Studi Kecamatan Sukaraja Kabupaten

³⁹ Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)...*, hal. 17-107

Selama, yang menyatakan bahwa implementasi dari PKH di Kecamatan Sukaraja pada kenyataannya belum mampu terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan program yang dibuat oleh pendamping PKH ternyata tidak sesuai dengan komponen kesejahteraan sosial, tidak adanya sanksi tegas pada peserta yang kurang aktif dalam program yang telah dibuat. Dan pelaksanaannya dinilai belum sesuai dengan tinjauan ekonomi islam. Karena peserta PKH tidak menggunakan dana secara tepat dan tidak memenuhi kewajiban mereka. Metode penelitian yang digunakan antara penelitian yang dilakukan Fitria Handayani dengan penelitian ini secara garis besar sama, dari segi waktu dan lokasi penelitian antara keduanya berbeda, disisi lain dalam penelitian fitria handayani ditinjau dalam perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian ini melakukan tinjauan pada perspektif ekkonomi secara umum. Dari sisi teori yang digunakan juga ada perbedaan, teori yang digunakan dalam penelitian Fitria yaitu teori PKH, Kemiskinan, dan Ekonomi Islam, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Ekonomi, Kemiskinan, Ekonomi Pembangunan, PKH, Efektivitas, Dan Implementasi Kebijakan. Karena konteks penelitiannya juga ada perbedaan, dalam penelitian Fitriani hanya terkait implementasi PKH sedangkan dalam penelitian ini melakukan tinjauan terhadap implementasi dan efektivitas PKH.⁴⁰

⁴⁰ Fitria Handayani, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan*

7. Septiana Riyanti (2019), dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Dan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Peserta PKH Kecamatan Pekalongan Barat), yang menyatakan jenis bantuan yang disalurkan yaitu berupa bantuan sembako dan bantuan non tunai, dan program *Family Development session (FDS)* yang merupakan langkah yang dilakukan oleh pendamping PKH secara terstruktur dan sistematis untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pentingnya aspek kehidupan, seperti ilmu tentang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak yang bisa masyarakat terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Implementasi dari PKH di Kecamatan Pekalongan Barat dalam menentukan peserta sudah tepat sasaran dan peserta PKH sudah tepat dalam alokasi dana, sehingga menjadikan PKH menjadi tepat guna dan bisa mencapai tujuan dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam seperti tanggung jawab dan keadilan, karena dalam pelaksanaannya sudah terdapat nilai tanggung jawab dan keadilan, sehingga program bisa berjalan secara efektif dan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Pekalongan Barat. Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif, terdiri dari sumber data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan antara

penelitian Septiana Riyanti dengan penelitian ini yaitu jika penelitian septiana melakukan tinjauan dalam perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan ekonomi secara umum, lokasi dan informan yang digunakan juga berbeda, dari segi teori yang digunakan juga terdapat perbedaan, jika dalam penelitian Riyanti teori yang digunakan berlandaskan pada teori kemiskinan dan pengentasan kemiskinan menurut perspektif Islam, kesejahteraan masyarakat secara umum dan dalam perspektif Islam, Efektivitas PKH, dan PKH. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Ekonomi, Kemiskinan, Ekonomi Pembangunan, PKH, Efektivitas, Dan Implementasi Kebijakan.⁴¹

8. Mas Denni Hasibuan (2017) dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Sibuhuan Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, yang menyatakan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Sibuhuan dinilai sudah efektif dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, hal ini terlihat dari tujuan yang ditetapkan sudah cukup jelas, dan mampu meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan, sehingga masyarakat merasa terbantu untuk periksa dan mengurangi angka anak putus sekolah. Hal ini juga didorong oleh aktifnya pendamping PKH dalam melakukan pertemuan untuk mendengarkan masukan dari peserta PKH, disisi lain

⁴¹ Septiana Riyanti, *Implementasi Dan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Pekalongan: Skripsi IAIN Pekalongan, 2019), hal. 108

pendamping PKH juga rutin melakukan monitoring pada setiap bulannya pada lembaran verifikasi kepada penerima manfaat PKH, dari peserta juga sudah mulai muncul kesadaran untuk mengecek kesehatannya dengan menggunakan layanan kesehatan dari PKH.⁴² Metode yang digunakan dalam penelitian Mas Denni sama dengan metode yang peneliti gunakan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya disini terletak pada teori yang digunakan antara keduanya terdapat perbedaan, dalam penelitian Denni menggunakan teori efektivitas, PKH, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Pemberdayaan Ekonomi, Kemiskinan, Ekonomi Pembangunan, PKH, Efektivitas, Dan Implementasi Kebijakan. Disisi lain penelitian Denni hanya melakukan tinjauan lebih lanjut untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan PKH, sedangkan dalam penelitian ini melakukan tinjauan lebih lanjut untuk mengetahui seperti apa implementasi dari PKH, apakah sudah tepat sasaran dan bisa dikatakan efektif dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, dari segi lokasi juga tentu berbeda yaitu antara Medan dan Kabupaten Lamongan.

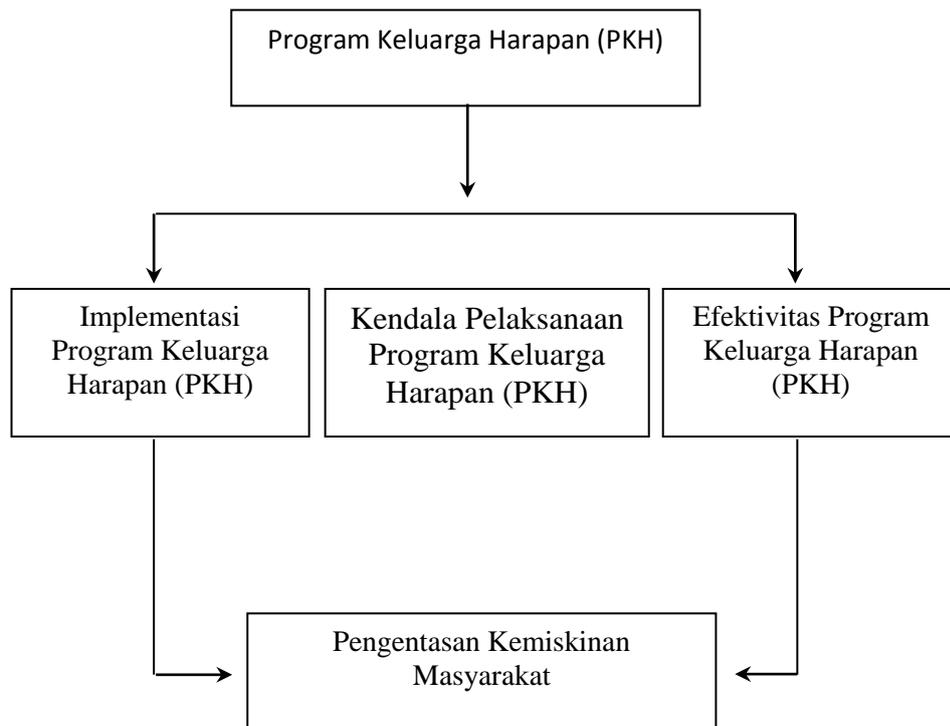
Berdasarkan pemaparan dari penelitian terdahulu di atas bisa dilihat perbedaan secara garis besar antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini, dan kebanyakan dari penelitian yang sudah dilakukan

⁴² Mas Denni Hasibuan, *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan...*, hal. 62

melakukan analisis antara implementasi PKH saja atau tingkat efektivitas pencapaian tujuan PKH saja, sehingga dalam penelitian ini berusaha melakukan tinjauan lebih lanjut antara keduanya, baik itu implementasi maupun efektivitas dari PKH. Teori yang digunakan antara penelitian satu dengan yang lainnya juga terdapat perbedaan.

C. Kerangka Teori

Gambar 2.1
Kerangka Teori



Berdasarkan kerangka teori di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul “Implementasi Dan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan” akan mencari informasi mendalam

tentang bagaimana implementasi, kendala, dan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di Desa Munungrejo.